

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan virus yang ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Jumlah kasus terkonfirmasi *COVID-19* didunia menurut *World Health Organization (WHO)* per tanggal 20 April 2021 sebanyak 141.754.944 kasus terkonfirmasi, termasuk 3.025.835 kematian. Kasus *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Indonesia pertama kali di temukan pada 2 Maret 2020 hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, awalnya ditemukan 2 orang warga negara Indonesia asal Depok, Jawa Barat yang kontak fisik dengan warga negara asing (WNA). Sementara kasus terkonfirmasi *COVID-19* di Indonesia per tanggal 20 April 2021 sebanyak 4.950 kasus baru ditemukan, dan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 1.609.300 kasus dan jumlah kematian sebanyak 43.567 kasus terkonfirmasi (Aqqabra et al., 2021).

Pandemi *COVID-19* terus berkembang pesat, dari awal kemunculannya WHO menyarankan untuk memfokuskan penanganan pandemi pada bidang kesehatan dengan memberlakukan isolasi wilayah dan menghentikan aktivitas yang melibatkan kerumunan. Pandemi ini memberikan dampak yang serius tidak hanya pada bidang kesehatan, namun aspek lain turut terkena imbasnya seperti perekonomian dan sosial (Aeni, 2021). Sejak munculnya *COVID-19* di Indonesia mulai memberlakukan protokol kesehatan yang harus diterapkan pada setiap aspek kegiatan, pembatasan sosial hingga *lockdown* total untuk mengatasi penyebaran virus *COVID-19*. Seiring berkembangnya penyebaran *COVID-19* yang begitu pesat dan bahaya yang akan terjadi jika tidak segera ditangani, cara selanjutnya adalah dengan mengembangkan vaksin untuk mencegah penyebaran *COVID-19*. Pengembangan vaksin yang efektif dan aman harus dilakukan karena harapannya dengan adanya vaksin dapat menghentikan penyebaran *COVID-19*. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Oktober 2020 telah meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mengatur kewenangan pemerintah, kementerian/lembaga dan para pejabat dalam rencana kegiatan vaksinasi (Rachman & Pramana, 2020).

Vaksinasi *COVID-19* merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk penanggulangan *COVID-19*. Pada 16 Maret 2020, dilakukan uji klinis fase 1 di Amerika Serikat pada vaksin berbasis mRNA (messenger ribonukleat acid) yang dikembangkan oleh Moderna InC, dan vaksin berbasis non-replikasi yang dikembangkan oleh *China's CanSino Biologics* juga memasuki uji klinis di China (Harapan et al., 2020). Namun, tantangan yang harus dilewati oleh Pemerintah Indonesia tentunya tidak mudah. Seperti halnya, yang tercantum dalam survei penerimaan vaksin yang dilakukan oleh Kemenkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), WHO (*World Health Organization*), ITAGI (*Indonesian Advisory Group on Immunization*), dan UNICEF (*United Nations Children's Fund*) disebutkan bahwa masyarakat menyatakan keraguan terhadap keamanan vaksin, kehalalan, dan keefektifan vaksin tersebut. Keraguan yang paling banyak diungkapkan mengenai keamanan dari vaksin sebanyak (30%); keraguan terhadap efektifitas vaksin (22%); ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%); takut dengan efek samping seperti demam dan nyeri (12%); serta (8%) menyebutkan karena alasan keagamaan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia et al., 2020).

Petugas kesehatan cenderung lebih yakin untuk melakukan vaksinasi *COVID-19*, dengan alasan ingin melindungi diri sendiri, teman, maupun keluarganya. Karena petugas kesehatan memiliki pengetahuan yang lebih dalam terkait dengan *COVID-19* dan risiko yang dihadapi oleh petugas kesehatan lebih besar dibandingkan dengan non-petugas kesehatan. Ditemukan dalam penelitian sebelumnya, yang menyebutkan bahwa sebagian besar pensiunan di Indonesia ataupun di Asia Tenggara cenderung memiliki persepsi risiko rendah terhadap *COVID-19* karena hanya menghabiskan waktu di rumah, tentunya hal ini akan berdampak pada penerimaan vaksin yang rendah (Harapan et al., 2020). Hal ini membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang mengurungkan niatnya untuk melakukan vaksinasi *COVID-19* karena menganggap dirinya memiliki risiko rendah seperti pada lansia dan ibu rumah tangga.

Rendahnya angka vaksinasi *COVID-19* akan memperburuk keadaan seperti lumpuhnya sektor ekonomi, sosial maupun pariwisata. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat dikarenakan banyak perusahaan yang menutup lapangan pekerjaan, gizi buruk, dan angka kematian tinggi di seluruh dunia. Tentunya peran pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait vaksinasi sangat diperlukan agar dapat mencapai kekebalan yang sudah di targetkan yaitu kisaran 60-75% individu untuk menekan penyebaran dan penularan virus *COVID-19* (Astuti et al., 2021).

Menurut data vaksinasi *COVID-19* Nasional per tanggal 8 Februari 2022, total vaksinasi dosis 1 mencapai 187,162, 201 dosis yaitu sekitar 89.87% sedangkan untuk dosis 2 sebanyak 132,390,945 dosis yaitu sekitar 63.57% dan untuk dosis 3 yang baru berjalan beberapa bulan ini baru mencapai 5,959,605 dosis yaitu sekitar 2.86% dengan total sasaran keseluruhan yaitu 208,265,720 jiwa. Kemudian untuk hasil vaksinasi D.I.Y dengan jumlah penerima vaksin dosis pertama yaitu 3,164,348 jiwa dengan presentase 109.9% dari target provinsi dan untuk vaksin dosis 2 dengan jumlah penerima vaksin 2,787,793 jiwa dengan presentase 96.81% dari target provinsi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memilih menggunakan ancaman terkait vaksinasi berbayar pada bulan selanjutnya sebagai upaya untuk mempercepat masyarakat melakukan vaksinasi karena belum dipungut biaya, selain itu masyarakat mendapat tekanan untuk melakukan vaksinasi secepatnya karena pemerintah telah menetapkan segala pelayanan masyarakat harus menggunakan bukti telah menerima vaksin. Hal ini diungkapkan oleh; petugas puskesmas yang menyatakan untuk mengurus segala sesuatunya harus menggunakan bukti telah menerima vaksin. Tentunya hal ini memberikan dampak yang positif agar masyarakat lebih patuh untuk segera melakukan vaksin, akan tetapi terdapat kemungkinan bahwa masyarakat melakukan vaksinasi dibawah tekanan dari orang lain atau melakukan vaksin bukan atas dasar kesadaran yang timbul pada dirinya (Dahlan, 2021).

Menurut Kozier, kepatuhan merupakan perilaku yang mengikuti anjuran terapi dan kesehatan yang diawali dengan tindakan mengikuti anjuran hingga patuh terhadap rencana. Berbagai faktor yang mempengaruhi timbulnya sikap patuh dari individu, yaitu motivasi, tingkat perubahan gaya, persepsi terkait keparahan saat mendapatkan masalah kesehatan, pengetahuan, dampak yang didapatkan dari perubahan, budaya, dan tingkat kepuasan serta kualitas pelayanan kesehatan yang diperoleh (Novi Afrianti, 2021).

Beberapa penelitian banyak menggunakan pendekatan teori *health belief model* (HBM) untuk menganalisis perilaku kesehatan masyarakat di berbagai negara. Salah satunya digunakan untuk melihat pengaruh komponen-komponen dalam teori tersebut terhadap kepatuhan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi *COVID-19*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *health belief model* (HBM) mempengaruhi tingkat kepatuhan protokol kesehatan sebesar 61.9% dan sebanyak 38.2% dipengaruhi oleh faktor lain (Lutpiah & Hatta, 2020).

Salah satu kecamatan dengan cakupan vaksinasi terendah di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Tempel. Pada Desember 2021 kecamatan tersebut masih rendah dalam cakupan vaksinasi *COVID-19* yaitu sekitar 78% hal ini diungkapkan oleh Koordinator Vaksinasi Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DIY Adi Riyanto saat meninjau vaksinasi *COVID-19* di Desa Mororejo. Walaupun sudah dapat memenuhi *herd immunity* karena di atas 70% namun masih perlu ditingkatkan dikarenakan capaian rata-rata vaksinasi tingkat kecamatan sudah 90% dan di Sleman sudah 92% (Sidik, 2021).

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan perilaku masyarakat di Kecamatan Tempel. Khususnya di Kelurahan Banyurejo, berdasarkan studi pendahuluan peneliti mendapatkan data bahwa terdapat 3 dusun yang cakupan vaksinasinya terendah diantara dusun lain yaitu Dusun Gondang, Ngabean, dan Nglengis. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dusun Gondang karena berdasarkan data yang didapatkan di dusun tersebut cakupan vaksinasinya terendah dibandingkan dengan dusun lain yaitu 81,27%.

Hasil dari studi pendahuluan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, cakupan vaksinasi di Kabupaten Sleman per tanggal 7

Februari 2022 berdasarkan data dari Komite Penanganan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), untuk vaksinasi dosis 1 mencapai 946.751 dosis atau 97,2% sedangkan untuk dosis 2 mencapai 808.137 dosis atau 82,9% dan untuk dosis 3 baru mencapai 72.411 dosis atau 8,2%. Dari total penduduk di Kabupaten Sleman yaitu 1.087.339 jiwa.

Menurut penjelasan dari petugas Puskesmas Tempel II yang mencakup Desa Banyurejo, mengatakan bahwa ada masyarakat yang kurang berkeinginan untuk melakukan vaksin. Hal ini terlihat ketika petugas mendatangi rumah warga untuk melakukan vaksinasi, justru mereka sengaja pergi dari rumah. Peneliti melakukan studi pendahuluan yang dilakukan dengan metode wawancara kepada 7 warga di Dusun Gondang, mengenai persepsi masyarakat terkait vaksinasi *COVID-19*. 2 warga mengungkapkan bahwa melakukan vaksinasi *COVID-19* ini karena tuntutan pekerjaan, kemudian 4 warga lain mengatakan bahwa melakukan vaksin karena mengikuti anjuran pemerintah dan 1 warga mengatakan karena kesadaran dirinya. Beberapa warga tersebut mengatakan kurang mendapatkan informasi terkait dengan vaksinasi, seperti saat peneliti meminta untuk menyebutkan manfaat dari vaksin terlihat beberapa warga yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut beberapa warga, upaya vaksinasi ini belum dapat mengatasi pandemi dan sebagian warga mengatakan vaksinasi merupakan upaya yang tepat dalam mengatasi pandemi *COVID-19*. Dan 1 warga mengungkapkan masih ragu dengan kehalalan dari vaksin *COVID-19*.

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditemukan adanya fenomena yang terkait dengan *COVID-19*. Hal tersebut diantaranya, adanya masyarakat yang belum berkeinginan untuk melakukan vaksin, adanya alasan yang mendasari atau memotivasi masyarakat untuk melakukan vaksin, kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan manfaat vaksin, dan kekhawatiran terhadap keamanan pada vaksin tersebut. Oleh karena itulah, penelitian ini penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana aplikasi HBM dalam kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui faktor HBM yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.

2. Tujuan khusus

- a. Diketahui karakteristik demografi responden dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.
- b. Diketahui hubungan *perceived susceptibility* dengan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.
- c. Diketahui hubungan *perceived severity* dengan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.
- d. Diketahui hubungan *perceived barrier* dengan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.
- e. Diketahui hubungan *perceived benefit* dengan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.
- f. Diketahui tabulasi silang antara *cues to action* dengan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.
- g. Diketahui hubungan *self efficacy* dengan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu keperawatan komunitas dan kaitannya dengan aplikasi *health belief model* dalam kepatuhan masyarakat mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.

2. Manfaat Praktis

a. Perawat puskesmas

Puskesmas mendapatkan data mengenai bagaimana keterkaitan antara HBM dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*. Sehingga ketika mengetahui perilaku masyarakat terkait vaksinasi *COVID-19*, puskesmas yang berhubungan langsung dengan masyarakat mampu berperan dalam upaya peningkatan angka vaksinasi pada masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus *COVID-19*.

b. Masyarakat

Masyarakat mengetahui aplikasi dari HBM yang meliputi *Percieved Susceptibility*, *Percieved Severity*, *Percieved benefits*, *Percieved barriers*, *Cues to action*, dan *Self efficacy* dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.

c. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan penerapan aplikasi *health belief model* dalam kepatuhan masyarakat mengikuti program vaksinasi *COVID-19*.